

# **PELAKSANAAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI DESA JIRENE KECAMATAN NOGY KABUPATEN LANNY-JAYA**

**MARDI KOGOYA  
JOHNNY HANNY POSUMAH  
HELLY F. KOLON DAM**

## **ABSTRAK**

Pengertian pelaksanaan program itu sendiri sebagaimana dalam pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9) mengemukakan definisi program sebagai “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena didalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa:

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **PENDAHULUAN**

Bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya serta kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat; bahwa untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Indonesia perlu dilakukan Langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program pengentasan kemiskinan; bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perlu dilakukan percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia berdasarkan

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Indonesia tentang percepatan pengentasan kemiskinan;

Bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat; bahwa pengentasan kemiskinan masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan program pengentasan kemiskinan masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai tujuan pembangunan millenium; bahwa untuk

meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai program dan kegiatan pelaksanaan kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana kendala terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan, perumahan air bersih, pertanian, sumberdaya alam dan lingkungan kehidupan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Beberapa hal ini pemerintah daerah sudah tetapkan program dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan masyarakat ini namun pemerintah daerah juga tidak melakukan sesuai dengan program yang ada; Maka kami harus meneliti sesuai dengan judul penelitian Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Desa Jirene Kecamatan Nogy Kabupaten Lanny-Jaya

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang terkait dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dapat dikemukakan pada bagian ini.

Tulusan. F dan Londa, V. 2014. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lolah II Kecamatan Tomnbariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014 (92 -102). Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan baik melalui kebijakan nasional maupun daerah berupaya untuk menjadikan masyarakat diberdayakan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menganalisis peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan di Desa Lolah II

Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa guna memperkuat dan mengembangkan konsep dan teori yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan. Metode penelitian kualitatif. Sampel diperoleh dari wawancara pada 10 orang informan yang didukung dengan observasi serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan program pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan peningkatan pengembangan usaha telah dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam program pelatihan dinilai oleh pemerintah dan lembaga keswadayaan masyarakat berhasil karena diikuti oleh masyarakat yang di undang pemerintah selalu berusaha memotivasi masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media baik melalui pengeras suara di desa, kegiatan sosial kemasyarakatan, maupun kegiatan lainnya yang banyak mengumpulkan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga baik kebutuhan dasar, kebutuhan sosial. Pendapatan masyarakat baik meningkat maupun menurun secara nyata berhubungan erat dengan kebutuhan hidup dalam pemenuhannya. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan yaitu kegiatan bantuan pinjaman modal usaha melalui program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan motivasi bekerja dan berusaha pelatihan serta pelatihan keterampilan usaha ekonomi.

Bungkaes H.R, Posumah.J.H dan Kiyai.B. 2013. Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Geme Kabupaten Kepulauan Talaud. *Acta Diurna Komunikasi* Volume 2 (2). Pengelolaan program RASKIN

terindikasi belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan kondisi pengelolaan program RASKIN dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan; dan (2) Menganalisis apakah tingkat kesejahteraan masyarakat turut ditentukan oleh efektivitas pengelolaan program RASKIN di desa yang sama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif/ Data dikumpulkan melalui teknik kuesioner yang disebarikan kepada 30 responden dari unsur aparat desa dan pengelola Raskin, serta 30 orang lainnya dari unsur masyarakat penerima manfaat program Raskin. Data dianalisis dengan menerapkan teknik analisis persentase (analisis tabel frekuensi), analisis Chi-Square (kai-kwadrat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) belum secara optimal dicapai, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya RTM sebagai penerima manfaat program Raskin masih berada pada kategori "sedang" atau menengah. Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan RTM antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program Raskin, dimana tingkat kesejahteraan RTM penerima manfaat program Raskin jauh lebih baik/tinggi dibanding tingkat kesejahteraan RTM sebelum memperoleh manfaat dari program Raskin, khususnya di Desa Mamahan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan yang positif dan nyata antara efektivitas pengelolaan program Raskin dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Disarankan agar program ini terus dilaksanakan secara kontinu/berkelanjutan dengan terus-menerus memperbaiki manajemen pendistribusiannya sehingga dapat menjangkau seluruh RTM yang ada dititik distribusi (desa).

TopuhS.D, Rares.J dan Kiyai.B. 2018. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan). Jurnal Administrasi Publik. Volume 4 (5).

Masalah kemiskinan hanya dapat dituntaskan apabila pemerintah melakukan kebijakan serius yang memihak kepada masyarakat miskin. Namun kebijakan yang dibuat justru sering kali kurang memihak kepada masyarakat miskin, sehingga semakin memperburuk kondisi masyarakat miskin bahkan menyebabkan seseorang yang tidak miskin menjadi miskin. Selama ini, banyak program pembangunan dari pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kasus kemiskinan. Program tersebut seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, Kompensasi BBM, dan lain-lain. Namun dari program-program tersebut tidak ada yang efektif, karena masyarakat hanya menerima bantuan langsung dan tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Menjawab tantangan tersebut, dalam penanganan masalah kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia dengan cara melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut, maka presiden telah mengeluarkan Perpres No. 54 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang bertugas untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan. Pada sidang kabinet tanggal 7 September 2006, presiden menetapkan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat. Pada Tanggal 12 September 2006 Menko Kesra, Menko Perekonomian dan menteri - menteri terkait sepakat "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)" sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Ditindaklanjuti Menko Kesra mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), Mendagri minta gubernur, bupati/walikota menyampaikan usulan lokasi, Bappenas merancang pendanaan PNPM. Presiden RI kemudian menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM-Mandiri. Dalam pelaksanaannya, banyak daerah yang menjadi sasaran PNPM-Mandiri baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program untuk pemberdayaan masyarakat kota yang lebih di kenal dengan P2KP, sedangkan untuk masyarakat desa dinamakan PNPM Mandiri Pedesaan. Seiring dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, Kec.Kendahe merupakan salah satu desa yang menjadi target dari PNPM Mandiri Pedesaan, yang terletak di Kecamatan Kendahe, Kabupaten Sangihe, memiliki potensi alam yang cukup baik untuk peningkatan ekonomi masyarakatnya. Dengan kehadiran PNPM Mandiri Pedesaan, kemampuan masyarakat dalam mengolah sumber daya alam tersebut seyogianya akan semakin baik, sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Di Kec.Kendahe telah dibentuk suatu program yang bernama Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan yang ada di desa tersebut. Simpan Pinjam Perempuan ini dibentuk seiring hadirnya PNPM Mandiri. Dalam pelaksanaan PNPM MP secara umum masalah yang sering terjadi yang menyebabkan pelaksanaan PNPM MP tidak berjalan dengan baik yakni adanya anggota kelompok yang sulit untuk mengembalikan angsuran pinjaman, akibatnya terjadi tunggakan pembayaran yang berdampak pada pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan kendala pada rendahnya partisipasi dari masyarakat yang terlibat di dalamnya, kemudian pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha untuk menggambarkan

permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kendahe, dan kemudian menganalisisnya sampai pada suatu kesimpulan absolut. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah di kemukakan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pemberian permodalan belum sepenuhnya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin, karena dari hasil penelitian masih ada anggota kelompok yang tidak termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin tetapi menjadi anggota kelompok penerima bantuan tambahan modal usaha. 2. Kurangnya pelatihan kepada kelompok-kelompok pemanfaat dalam pengelola usaha sehingga sebagian besar dari anggota kelompok usahanya tidak berkembang (Gagal). 3. Kurangnya anggota pihak UPK, sehingga intensitas UPK sering kali menurun, karena mengingat banyaknya beban kerja dari UPK dalam mengelola kegiatan SPP. Bertitik tolak dari hasil penemuan penelitian tersebut maka perlu direkomendasi beberapa hal dalam rangka peningkatan keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan terutama kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan (SPP), yaitu : 1. UPK harus lebih memprioritaskan kelompok pemanfaat dengan anggota yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin. 2. Kaum perempuan anggota kelompok simpan pinjam (SPP) perlu ditingkatkan lagi pelatihan dalam hal mengelola kegiatan usaha. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan perlu ditingkatkan guna meminimalkan penyimpangan dari tujuan dan sasaran program. 4. Proses Verifikasi harus tetap di pertahankan dan di tingkatkan lagi dalam pemberian pinjaman kepada anggota kelompok.

### **Konsep Pelaksanaan Program**

Pengertian pelaksanaan program itu sendiri sebagaimana dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (1997: 308), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9) mengemukakan definisi program sebagai “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena didalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa: Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **Pengentasan Kemiskinan**

Fungsi pengentasan menurut (Curative Fonction) adalah fungsi konseling yang menghasilkan mampu konseli atau kelompok konseli untuk memecahkan

masalah-masalah yang di alaminya dalam kehidupan dan tahu perkembangan. Proses cara perbuatan mengentas atau mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dalam seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksud untuk menangkap orang keluar dari kemiskinan secara permanen langka-langka. Sepertinya yang dipromosikan merupakan permasalahan utama yang harus dilakukan.

Fungsi kemiskinan adalah keadaan dimana yang terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat perlindungan, pendidikan dan kesehatan, kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komprentif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluatif dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara pemahaman utamanya mencakup: Apa itu pengentasan kemiskinan? Secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, pemerintah menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Prioritas pada pengentasan kemiskinan dilanjutkan oleh KIB II. Pelaksanaan kemiskinan tujuan dikeluarkannya perpres tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 8 – 10% pada akhir Tahun 2014. Kabinet daerah bersatu telah menetapkan program pembangunannya dengan menggunakan strategi tiga jalur (triple track strategy) yang berbasis Pro-growth, pro-employment dan pro-poor.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini, pendekatan yang diambil adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Pendekatan kualitatif diartikan juga sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif dipilih peneliti berdasarkan tujuan agar mendapatkan gambaran secara detail tentang pelaksanaan program kemiskinan. Harapan dalam pelaksanaan Program Pengentaskan Kemiskinan Masyarakat di Desa Jirene Kecamatan Nogy Kabupaten Lanny-Jaya, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi. Penelitian ini menggunakan landasan berpikir untuk memahami makna suatu gejala secara fenomenologi.

#### **Sumber Data**

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat explanation (menerangkan, menjelaskan), karena itu bersifat to learn about the people (masyarakat obyek), sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat understanding (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat to learn about the people (masyarakat sebagai subyek). Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.

Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

#### **Narasumber (Informan)**

Dalam penelitian kualitatif sumber data ini disebut "Responden" atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti sedangkan pada peneliti

kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu, ia disebut informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subyek yang diteliti. Karena ia juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.

#### **Tempat atau Lokasi**

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya.

#### **Dokumen atau Arsip**

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Data ini biasanya berasal dari data penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga atau instansi. Data ini berupa Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH dan beberapa sumber referensi lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Seperti memperoleh informasi dari Tim di Desa Jirene Kecamatan Nogy Kabupaten Lanny Jaya, Petugas Pendamping PKH Desa dan Keluarga Penerima Manfaat Desa Jirene. Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti hari semua sumber yang sudah ada. Data ini biasanya berasal dari data penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga atau instansi. Data ini berupa Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH dan beberapa sumber referensi lainnya.

#### **Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami

informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli.

Berdasarkan kriteriinforman yang dikatakan oleh Spradley di atas, peneliti menentukan informan yang memenuhi kriteria tersebut. Informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang terika permasalahan pengentaskan kemiskinan di Desa Jirene Kecamatan Nogy Kabupaten Lanny-Jaya berjumlah 5 orang yaitu:

Pemerintah Desa 1 orang

Petugas Pendamping PKH Desa 1 orang

Keluarga Penerima Manfaat 3 orang

### **Teknik Pengambilan Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang pengambilan adalah data primer dan data sekunder. Untuk pengambilan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengambilan data, yaitu:

#### **1. Observasi**

Merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung (*direct observation*) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat (*recognized outsider*) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas.

Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

#### **2. Wawancara**

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan masyarakat.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Program Keluarga Harapan Sebagai Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan**

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak Tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (*faskes*) dan fasilitas layanan pendidikan (*fasdik*) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret Tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah

menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada Tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019 | 10 jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Aspek kesehatan dan rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil yang tidak memadai berakibat pada buruknya kondisi kesehatan dan asupan gizi bayi yang dilahirkan. Kejadian balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir, pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari Tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada Tahun 2017.

Berdasarkan Buku Saku Ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2017 masih terdapat angka putus sekolah pada semua jenjang sekolah dasar dan menengah. Tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat indeks pembangunan rendah. Oleh karena itu mendorong anak untuk tetap bersekolah pada usia remaja menjadi hal mendasar. Keikutsertaan mereka yang berada di luar sistem sekolah pun harus menjadi perhatian utama. Tanpa perhatian khusus pemerintah anak putus sekolah rentan menjadi korban eksploitasi, termasuk perdagangan anak. Bahkan mereka rentan pula terhadap pelanggaran hukum dari penyalahgunaan obat terlarang sampai dengan kriminalitas. Putus sekolah juga berdampak pada minimnya kawasan / ilmu pengetahuan

yang dimiliki oleh anak, masa depan anak tidak jelas, menyebabkan banyaknya pengangguran di masa mendatang, dan di masa mendatang anak ini cenderung berpikiran lebih mementingkan adat/budaya dari pada pendidikan, seperti halnya orang tuanya.

Program pemerintah untuk mengurangi jumlah putus sekolah pada tingkat sekolah dasar cukup berhasil. Hal itu dapat dilihat pada Data Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud Tahun 2017 jumlah siswa putus sekolah tingkat sekolah dasar menunjukkan penurunan sejak tahun ajaran 2015/2016, 2016/2017, dan 2017/2018. Hal yang sama terjadi pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Perkembangan jumlah putus sekolah yang harus menjadi perhatian ada pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan. Angka Partisipasi Murni (APM) dihitung dari jumlah siswa per jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang. Jumlah anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan dasar menjadi salah satu indikator keberhasilan program menurunkan angka putus sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) pada empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Meningkatnya APM bisa jadi pengaruh dari berbagai program pemerintah termasuk bantuan tunai bersyarat PKH.

Seluruh KPM PKH berhak mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Program-program tersebut antara lain:

Wawancara ini juga dilakukan dengan anggota masyarakat desa yang menerima bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Bantuan yang diterima pada umumnya berupa uang. Uang yang diterima langsung digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penggunaan uang bantuan biasanya untuk beli beras, gula, kopi dan kebutuhan lainnya yang dimakan

setiap hari. Ada juga yang digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah anak seperti baju, sepatu, buku, dan alat tulis lainnya. Bantuan ini biasanya hanya akan bertahan paling lama satu bulan dan habis dalam bentuk konsumsi masyarakat. Keadaan ini tidak akan menjadikan masyarakat keluar dari masalah kemiskinan akan tetapi hanya membantu memenuhi kebutuhan hidup.

Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di bidang Pendidikan Bantuan yang diterima masyarakat merupakan bantuan Program Keluarga Harapan. Bantuan dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan anak yang bersekolah. Bantuan kepada anak diterima oleh orang tua dan digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah.

Ada juga bantuan untuk mahasiswa Besar bantuan yaitu Rp 1.000.000 dan Rp 2.000.000 Bantuan diterima dalam tiga bulan sekali terima. Ada pendamping desa yang melakukan pelaksanaan dan pengawasan. Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Bidang Kesehatan. Bantuan di bidang kesehatan juga dalam bentuk uang. Uang diberikan untuk ibu janda dan ibu hamil.

Ada juga bantuan dalam bentuk bahan bangunan berupa seng rumah. Tidak ada fasilitas kesehatan yang tersedia di desa. Bantuan semua datang dari pemerintah. Masyarakat butuh fasilitas kesehatan (obat, puskesmas dan dokter).

### **Pembahasan**

Pelaksanaan program pemerintah untuk penyelesaian masalah kemiskinan di masyarakat saat ini dilakukan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bagian dari kegiatan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Bantuan yang diberikan berupa uang yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan maupun bantuan sosial lainnya.

Kabupaten Lanny-Jaya yang berada di Provinsi Papua memiliki 10 distrik atau kecamatan. Salah satu distrik bernama Distrik

Nogy yang memiliki desa atau kampung yang bernama Desa Jirene. Desa ini merupakan desa yang penduduknya masih berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk yang ada tersebar dalam 82 Kepala Keluarga. Dengan hadirnya Program Keluarga Harapan maka menjadi terbantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap hari.

Penelitian ini menyoroti dua bentuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu program bantuan pendidikan dan program bantuan kesehatan. Adapun bantuan yang diterima semuanya dalam bentuk uang. Uang yang diterima oleh setiap kepala keluarga sebesar Rp .4.000.000 ditambah lagi ada bantuan untuk anak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Ada juga bantuan untuk mahasiswa. Kesemuanya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan.

Kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan bantuan pendidikan bahwa uang yang diterima memang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan akan tetapi tidak diikuti dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yaitu fasilitas sekolah. Sekolah yang ada di Desa Jirene masih kekurangan sarana belajar seperti buku pelajaran, gedung belajar yang kurang memadai.

Bantuan yang diterima oleh penduduk sehubungan dengan Program Keluarga Harapan digunakan untuk kebutuhan anak seperti alat tulis menulis dan pakaian serta sepatu maupun tas sekolah. Keadaan ini tidak sejalan dengan kebutuhan yang dihadapi oleh sekolah. Apalagi guru yang mengajar masih kurang. Keadaan demikian menjadikan permasalahan kemiskinan tetap akan terjadi. Olehnya diperlukan langkah nyata dari pemerintah bukan hanya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat akan tetapi juga memperbaiki fasilitas pendidikan yang ada di desa.

Bantuan yang kedua dalam Program Keluarga Harapan yaitu bantuan dalam hal kesehatan. Bentuk bantuan yang diterima yaitu dalam hal bantuan untuk ibu hamil dan

ibu janda. Besaran bantuan yang diterima yaitu Rp.1.500.00 untuk ibu janda dan Rp 500.000 untuk ibu hamil. Bantuan ini juga untuk memenuhi kebutuhan ibu janda dan ibu hamil. Melihat pedoman kegiatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial bahwa Program Keluarga Harapan di sektor kesehatan berupa jaminan kesehatan seperti adanya Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat. Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat ini akan digunakan oleh penduduk jika mengalami sakit.

Desa Jirene yang sangat jauh dari pusat fasilitas kesehatan merasa kurang bermanfaat dengan adanya program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sebab jika ada penduduk yang sakit sangat sulit untuk berobat di rumah sakit. Hal ini dapat dipahami karena jarak dari Desa Jirene ke kecamatan sekitar 40 Km. Sedangkan untuk ke ibukota kabupaten sekitar 60 Km dan ibukota provinsi sekitar 147 Km. Jarak inipun akan terhalangi oleh medan jalan yang belum memadai dan tidak baiknya sarana transportasi.

Akibat dari jarak yang jauh dari desa ke pusat fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit menjadikan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kartu Indonesia Sehat tidak dapat berfungsi dengan baik. Keadaan inilah yang oleh penduduk dianggap kurang baik pelaksanaan program pengentasan kemiskinan sebagaimana yang dilakukan melalui Program Keluarga Harapan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan masyarakat di Desa Jirene Kecamatan Nogy Kabupaten Lanny-Jaya dilakukan oleh pemerintah melalui Program Keluarga Harapan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini berfokus pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Akan tetapi dalam pelaksanaan dianggap belum dapat

membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Keadaan ini disebabkan karena:

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di bidang pendidikan berbentuk uang untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak. Bantuan ini tidak diikuti dengan perbaikan fasilitas pendidikan dari pemerintah seperti perbaikan gedung sekolah, menambah jumlah guru serta memperbanyak fasilitas pembelajaran untuk menjadikan berjalannya kegiatan belajar mengajar yang membuat anak cerdas dan pintar.

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di bidang kesehatan yang berbentuk uang dan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak dapat digunakan dengan baik karena fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit tidak ada di desa dan jaraknya jauh dari desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ala, Andre Bayo. 1981. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT Raja
- Grafindo Persada. Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Terjemah:
- Susetiawan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Efendi, Tadjuddin Noer. 1993. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

- Friedmann, John. 1987. *Planning in The Public Domain: From Knowledge to Action*. Oxford, UK: Princeton University.
- Kartasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi Daerah - Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Lewis, John P. dan Valeriana Kallab (Eds).1987. *Mengkaji Ulang Strategi-Strategi Pembangunan*. Terjemah: Pandam Guritno. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mandelbaum, Seymour J., Luigi Mazza dan Robert W. Burchell (Eds). 1996. *Explorations in Planning Theory*. New Jersey: Center for Urban PolicyResearch.